



Pengembangan Konsep Diplomasi Pertahanan Dan Implementasinya Dalam Pengiriman Kontingen Garuda TNI Pada Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Eka Yuninda¹⁾, Purnomo Yusgiantoro²⁾, Pujo Widodo³⁾, Rodon Pedrason⁴⁾

Program Studi Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding author: eyuninda91@gmail.com

Abstrak

Diplomasi pertahanan telah menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan luar negeri dan mencapai kepentingan nasional. Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB tidak hanya berkontribusi pada perdamaian dunia, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber tertulis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran diplomasi pertahanan. TNI menunjukkan profesionalisme tinggi dalam misi internasional, sehingga terus dipercaya untuk terlibat dalam berbagai misi peacekeeping PBB sehingga telah meningkatkan legitimasi diplomatik dan citra internasional Indonesia. Dukungan masyarakat terhadap keberadaan peacekeepers TNI menjadi modal penting yang dapat dioptimalkan melalui strategi diplomasi pertahanan yang terarah. Namun, hingga saat ini, integrasi antara tugas pertahanan dengan promosi produk strategis nasional belum terstruktur secara optimal. Contoh dari negara lain, seperti Korea Selatan yang memanfaatkan misi perdamaian untuk mempromosikan produk industrinya, menunjukkan potensi besar yang dapat diadopsi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam diplomasi pertahanan adalah kurangnya sinergi antar institusi terkait dan belum adanya panduan strategis yang jelas. Kesimpulannya, diplomasi pertahanan berperan strategis dalam membangun kepercayaan, mencegah konflik, serta memperluas pengaruh nasional di ranah internasional. Dengan kerangka hukum yang kuat dan koordinasi lintas sektor, partisipasi TNI di Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) dapat diintegrasikan dengan promosi industri pertahanan nasional, meningkatkan daya saing internasional, serta memperkuat posisi diplomatik Indonesia.

Kata kunci: Diplomasi Pertahanan, Kepentingan Nasional, Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, Industri Pertahanan

Abstract

Defense diplomacy has become a crucial instrument in supporting foreign policy and achieving national interests. Indonesia's participation in United Nations Peacekeeping Missions, not only contributes to global peace but also opens opportunities for the development of the national defense industry. This study adopts a qualitative approach with data analysis from various written sources to provide a comprehensive understanding of the role of defense diplomacy. The Indonesian National Armed Forces (TNI) have demonstrated high professionalism in international missions, which has earned continuous trust and recognition from the UN to participate in numerous peacekeeping missions. This participation has enhanced Indonesia's diplomatic legitimacy and international image. Public support for TNI peacekeepers serves as an essential asset that can be optimized through a well-directed defense diplomacy strategy. However, the integration of defense duties with the promotion of national strategic products remains underdeveloped. Other countries, such as South Korea, have leveraged peacekeeping missions to promote their defense products, highlighting significant potential that Indonesia can adopt. This study identifies the main challenges in defense diplomacy, particularly the lack of synergy among relevant institutions and the absence of a clear strategic framework. In conclusion, defense diplomacy plays a strategic role in building



trust, preventing conflicts, and expanding national influence on the international stage. With a solid legal framework and cross-sectoral coordination, TNI's participation in Peacekeeping Operations (PKO) can be integrated with the promotion of the national defense industry, enhancing international competitiveness and strengthening Indonesia's diplomatic position.

Key words: *Defense Diplomacy, National Interest, Peacekeeping Operations, Defense Industry.*

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya Diplomasi Pertahanan menjadi bagian dari alat untuk mencapai kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri. Implementasi Diplomasi Pertahanan di benua Eropa digunakan sebagai sarana rekonsiliasi negara-negara aliansi NATO dan Pakta Warsawa. Melalui program seperti NATO's *Partnership for Peace*. Pemerintah Eropa Barat menggunakan kegiatan tanpa kekerasan seperti pertukaran perwira dan program pendidikan untuk mereformasi militer Eropa Timur dan membantu menanamkan norma-norma demokrasi sipil-militer. Keberhasilan upaya Eropa Barat untuk membentuk Eropa Timur ini merupakan lambang evolusi diplomasi pertahanan dari alat politik menjadi alat untuk mempromosikan reformasi internal di negara-negara penerima (Winger, 2017).

Diplomasi Pertahanan berfungsi sebagai alat penting bagi Amerika dan Soviet ketika mereka berusaha mengajak negara-negara yang baru merdeka untuk masuk ke dalam aliansi masing-masing. Dengan bantuan ekonomi, serta kesediaan Soviet dan Amerika untuk memasok senjata ke negara-negara baru ini serta memberikan pelatihan perwira mereka, Amerika dan Soviet telah membuktikan bahwa Diplomasi Pertahanan menjadi mekanisme yang berguna dalam membangun keamatan ikatan politik mereka (Winger, 2017). Lebih lanjut, Program Diplomasi Pertahanan kemudian berkembang menjadi Bantuan Keamanan, yang dinilai bukan berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan fungsi militer negara penerima, tetapi utilitas politik dalam membawa negara penerima bantuan keamanan pada aliansi Amerika atau Soviet.

China juga semakin menekankan Diplomasi Militer untuk memajukan tujuan kebijakan luar negeri dan membentuk lingkungan keamanannya. Diplomasi militer adalah bagian dari upaya kebijakan luar negeri China yang lebih luas untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan citra internasional, mengembangkan *soft power*, dan membentuk wacana internasional. Tujuan Diplomasi Pertahanan dari China adalah sebagai berikut (Kenneth Allen, Phillip C. Saunders, and John Chen, 2017):

1. *Support PRC Diplomacy*. Diplomasi militer dalam rangka mendukung diplomasi China yang lebih luas dengan melibatkan negara-negara mitra guna meningkatkan citra negara China.
2. *Shape Security Environment*. Dalam Buku Putih Pertahanan 2015 disebutkan bahwa PLA akan "mengembangkan hubungan militer-ke-militer...dan menciptakan lingkungan keamanan yang menguntungkan bagi perkembangan damai China.
3. *Collect Intelligence*, terhadap kemampuan dan tujuan negara lain pada area operasi potensial bagi China.
4. *Learn New Skills and Benchmarking*, dengan membandingkan keabilitas PLA dengan militer negara lain.

Sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia pada tanggal 28 September 1950 bergabung ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota yang ke-60. TNI sebagai alat pertahanan negara merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan kebijakan negara tersebut, hal ini tercantum dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan Pertahanan Negara untuk ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, serta dalam Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa salah satu perwujudan Tugas Pokok dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar pemerintah Indonesia.



Keterlibatan pasukan TNI pada Operasi Perdamaian Dunia (*Peace Keeping Operation / PKO*) di bawah bendera PBB juga merupakan sarana diplomasi militer yang dapat menaikkan harkat, martabat dan citra Indonesia di mata dunia internasional. Keberhasilan Satgas Kontingen Garuda TNI di daerah misi menunjukkan suatu eksistensi bangsa dan negara Indonesia sehingga dapat disejajarkan dengan bangsa dan negara lainnya.

Posisi Indonesia yang saat ini menjadi anggota sementara Dewan Keamanan PBB (Kemlu, 2020), merupakan dorongan positif untuk selalu berpartisipasi dan berperan secara lebih aktif sebagai salah satu *Troops Contributing Country (TCC)* dalam kegiatan mendukung operasi pemelihara perdamaian dunia melalui pengiriman personel dalam bentuk pasukan Kontingen Garuda, Pengamat Militer (*Military Observer*) dan Staff Markas Komando (*Staff of PKO / Military Staff Officer*).

Melalui pengiriman misi tersebut TNI telah menjadi salah satu alat diplomasi pertahanan yang efektif dalam memenangkan kepentingan nasional. Arah diplomasi pertahanan Indonesia berdasarkan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 meliputi kerja sama internasional untuk membangun rasa saling percaya antar bangsa, meningkatkan kapasitas pertahanan dan industri pertahanan yang diarahkan dalam bentuk diantaranya melalui peningkatan peran aktif Indonesia sebagai anggota PBB dalam misi perdamaian dunia.

Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB tidak hanya memberikan keuntungan dalam menjaga perdamaian dunia, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Penggunaan produk dalam negeri seperti *Armored Personnel Carrier (APC)* Anoa dan Komodo, serta senjata api SS dari PT Pindad, hingga seragam militer/polisi buatan industri tekstil nasional menunjukkan potensi besar promosi produk strategis Indonesia melalui keterlibatan dalam misi internasional. Sehingga, TNI memiliki peran penting dalam mengintegrasikan aspek pertahanan, diplomasi, dan pembangunan dalam khususnya manfaat ekonomi dari promosi penggunaan alutsista nasional serta nilai ekonomi dari promosi budaya yang dilakukan oleh *peacekeepers* Indonesia.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai sumber tertulis (buku, jurnal ilmiah, artikel) untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai topik terkait Diplomasi Pertahanan. Tujuannya adalah mengidentifikasi konsep dan teori Diplomasi Pertahanan dan implementasinya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi

Menurut Berridge & James (*A Dictionary of Diplomacy*, 2003, hal. 69) diplomasi memiliki beberapa arti, yaitu;

1. *The conduct of relations between sovereign states*, diplomasi adalah cara berkomunikasi negara yang memungkinkan negara memiliki hubungan erat dan kompleks.
2. *The use of tact in dealing with people*, diplomasi sebagai kemampuan yang sangat penting dalam penyelenggaraan hubungan antar negara.
3. *Any attempt to promote international*, diplomasi adalah kegiatan negosiasi negara di forum internasional.
4. *Foreign policy*, diplomasi merupakan kebijakan luar negeri.

Terkait dengan pengertian diplomasi sebagai kebijakan luar negeri, Peter Marshal (dalam Wibisono, 2015, hal. 3) membedakan diplomasi dengan kebijakan luar negeri. *Foreign policy is about what to do and diplomacy is about how to do it*, sehingga diplomasi merupakan cara atau alat yang digunakan dalam melakukan kebijakan luar negeri.

Inti dari diplomasi adalah dialog antara negara yang merdeka (Watson, 2005, hal. 1), diplomasi merupakan dialog yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan cara

menghindari perang. Pengertian ini sesuai dengan pengertian diplomasi secara tradisional yaitu hubungan antara negara atau perwakilan negara dengan tujuan menyelesaikan masalah internasional secara damai.

Dalam hubungan antar negara, diplomasi diartikan sebagai alat hubungan internasional, sedangkan negosiasi adalah instrumen dalam diplomasi. Adapun komponen utama dalam negosiasi adalah pihak dan posisinya (*parties and their positions*), proses dan kekuatan yang terlibat (*the process and power involved*), dan ketegangan kekuatan tawar-menawar meliputi kompetisi dan kerjasama (*the tension between bashing and bargaining – in other words between competition and cooperation*) (Meerts, 2015, hal. 40).

Diplomasi Militer

Diplomasi militer tradisional hanya berfokus pada “penggunaan militer untuk pengembangan diplomasi dan keterlibatannya dalam berbagai pengaturan keamanan.” (B. S. Sachar, 2004, hal. 290). Lebih lanjut, mengikuti definisi Berndt von Staden, mantan Menteri Luar Negeri Republik Federal Jerman, diplomasi militer “berkaitan dengan masalah misi militer, serta partisipasi perwakilan militer dalam negosiasi perlucutan senjata dan pengendalian senjata”. Oleh karena itu, diplomasi militer dapat dipahami sebagai serangkaian tugas khusus hanya untuk perwakilan militer, atase pertahanan, atau perwakilan militer lainnya dalam menjalankan misi dan operasi perdamaian mereka dan untuk kerja sama militer internasional.

Sebaliknya, dalam pandangan Inggris, diplomasi militer hanya mengacu pada tugas dan peran atase militer (United Kingdom Ministry of Defense 2000, hal. 2). Selain itu, dari perspektif tradisional yang diwakili di Polandia oleh Julian Sutor (2005, hal. 105), diplomasi militer adalah kegiatan *Ministry of National Defence* dalam bidang keamanan dan pertahanan negara di kancah internasional, yaitu pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan hanya di luar negara, tidak dengan memperhatikan misalnya peran Angkatan Bersenjata, Akademi Militer atau kerja sama industri pertahanan. Sehingga, tersirat adanya tugas-tugas yang lebih luas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan untuk keamanan dan pertahanan negara. Konsep diplomasi militer (menjaga integritasnya dalam bidang isu dan jenis pekerjaan yang disebutkan di atas) harus menjadi bagian dari konsep yang lebih luas yaitu pada konsep diplomasi pertahanan (Lech DRAB, 2018).

Menurut KA Muthanna, Kata 'militer (*military*)' dan 'pertahanan (*defense*)' digunakan secara dinamis dan dapat dipertukarkan dengan bebas. Istilah 'militer' dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan oleh komponen unit berseragam (militer) dalam pembentukan pertahanan negara. Sedangkan istilah 'pertahanan' dapat digunakan untuk menyiratkan seluruh komponen pembentukan pertahanan termasuk unit yang tidak-berseragam (militer) seperti Kementerian, Perusahaan R&D, Pelatihan Nasional Institusi Seperti Perguruan Tinggi Pertahanan Nasional dan Universitas Pertahanan Nasional. Sedangkan tujuan dari diplomasi militer adalah antara lain (KA Muthanna, 2011):

- Dialog politik, keamanan dan pertahanan strategis;
- Perjanjian / MoU / perjanjian pertahanan;
- Transparansi dalam maksud berkenaan dengan militer nasional kebijakan;
- Bantuan dalam pemeliharaan pemerintah yang sah;
- Kontak personel profesional;
- Pertukaran persepsi;
- Partisipasi dalam Operasi Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB PKO) atau koalisi dan bantuan dan bantuan kemanusiaan;
- Memperkuat hubungan pertahanan untuk mempromosikan pengaruh dan akses sendiri;
- Meningkatkan Kemampuan Pertahanan di lingkup material pertahanan;
 - Pengadaan dan pengembangan peralatan pertahanan;



- Menjadikan industri pertahanan dan Litbang sendiri efektif dan layak secara finansial;
- Memanfaatkan pembelian pertahanan dalam jumlah besar;
- Membantu negara asing yang bersahabat untuk mengembangkan kemampuan pertahanan mereka (tanpa mengganggu dengan keamanan sendiri);
- Melakukan keterlibatan militer internasional untuk meningkatkan militer kemampuan sendiri;
- Mempromosikan interoperabilitas pertahanan dan militer;
- Penunjukan atase pertahanan ke luar negeri.

Diplomasi Pertahanan

Thomas Schelling (1980:168, dalam Jackson & Sorensen, 2010, hal. 76) mengartikan diplomasi dalam pandangan realist sebagai kegiatan tawar-menawar (*bargaining*), ada hasil yang diinginkan melalui tawar-menawar tersebut. Akan tetapi, dengan adanya kekuatan militer yang cukup, sebuah negara tidak perlu melakukan tawar-menawar. Hal ini sesuai dengan pengertian *coercive diplomacy*, yaitu penggunaan kekuatan militer sebagai ancaman yang memaksa pihak lawan untuk menyepakati /menyetujui negosiasi.

Penggunaan unsur militer dalam diplomasi merupakan pengertian dari diplomasi pertahanan (Berridge & James, 2003, hal. 66). Adapun pengertian diplomasi pertahanan secara umum yaitu hubungan antar negara yang membahas aspek keamanan dan pertahanan serta masalah-masalah lintas sektoral dan multi dimensional.

Konsep diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Pertahanan Inggris dalam *Strategic Defence Review* pada tahun 1998. Diplomasi pertahanan merupakan penggunaan angkatan bersenjata untuk mendukung diplomasi dalam upaya pencegahan atau pengelolaan konflik. Tujuan diplomasi pertahanan adalah untuk menyediakan kekuatan yang dapat memenuhi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kementerian pertahanan untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan serta membantu dalam pengembangan angkatan bersenjata yang bertanggungjawab secara demokratis, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik (British Ministry of Defence, 1998, hal. 106).

Menurut Anwar (Pengantar Diplomasi Pertahanan, 2015, hal. 34) diplomasi pertahanan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam berhubungan dengan negara-negara lain di sektor pertahanan dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan pertahanan yang ada, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam hal pertahanan. Aktor yang digunakan dalam diplomasi pertahanan adalah perangkat pertahanan negara, seperti Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kegiatan diplomasi pertahanan dirumuskan oleh Cottey dan Foster (2004) sebagai berikut:

- *Bilateral and multilateral contacts between civilian defence officials and senior military officers*
- *Appointment of defence attachés to foreign countries*
- *Bilateral defence cooperation agreements*
- *Training of foreign civilian and military personnel*
- *Provision of advice and expertise on democratic civilian control over the armed forces, defence management and military technical areas*
- *Contacts and exchanges between military personnel and units, port calls*
- *Placement of liaisons officers in defence and military establishment of partner countries*
- *Deployment of training teams*
- *Provision of military equipment and other material assistance*
- *Bilateral or multilateral military exercise or training*

Diplomasi pertahanan adalah konsep yang lebih luas daripada diplomasi militer karena menggabungkan tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai dengan memperluasnya ke isu-isu yang terkait dengan membangun kepercayaan (*to building trust*), mencegah krisis dan penyelesaian konflik (*preventing crises and conflict resolution*), dialog pertahanan (*defense dialogue*), mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral (dalam organisasi internasional), serta juga penggunaan militer dalam misi dan operasi internasional. Sehingga pemahaman kontemporer tentang konsep diplomasi pertahanan banyak dicirikan oleh definisi dan aktivitas internasional berdasarkan dialog dan kerja sama oleh Kementerian Pertahanan (Lech DRAB, 2018).

Kementerian Pertahanan Spanyol mendefinisikan Diplomasi Pertahanan sebagai “Berbagai kegiatan internasional terutama berdasarkan dialog dan kerja sama, dilakukan secara bilateral oleh Kementerian Pertahanan dengan sekutu, mitra dan negara sahabat lainnya untuk mendorong pencapaian tujuan kebijakan pertahanan dalam mendukung kebijakan luar negeri Spanyol.”

Du Plessis menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memobilisasi “keahlian dan disiplin yang terlatih” dari militer untuk mencapai tujuan nasional dan luar negeri di luar negeri” (Du Plessis, 2008, hal. 92 dalam Blannin, Patrick, 2018). Sedangkan, Bisley berpendapat bahwa “meskipun mungkin bersifat teknis, namun pada akhirnya pada akhirnya bersifat politis ... menggunakan personel dan aset pertahanan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan secara lebih umum mengelola hubungan antar negara” (Bisley, 2014, hal. 14, dalam Blannin, Patrick, 2018).

Willard menyajikan diplomasi pertahanan sebagai “perilaku negosiasi diplomat militer dan hubungan lain antar negara, militer negara, dan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi lingkungan tempat militer beroperasi (Willard, 2006 hal.9, dalam Blannin, Patrick, 2018). Sedangkan K. A. Muthanna mendukung pernyataan yang menyatakan “diplomasi pertahanan dapat memajukan tujuan kebijakan luar negeri negara tertentu dengan mengelola hubungan luar negeri pertahanan dan mendukung inisiatif diplomatik pemerintah lainnya” (K. A. Muthanna, 2011, hal. 3).

Sebelum berakhirnya Perang Dingin, diplomasi pertahanan digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan negara-negara sekutu atau untuk memfasilitasi pertukaran senjata antara negara-negara sahabat. Setelah Perang Dingin berakhir, diplomasi pertahanan “baru” muncul, memberikan jalan baru hubungan diplomatik dan kerja sama militer antara negara-negara bekas musuh atau membutuhkan dukungan untuk mengubah struktur militer mereka (Andrew Cottey and Anthony Forster, 2004).

Senada dengan hal diatas, Juan Emilio Cheyre menjelaskan bahwa Diplomasi pertahanan awalnya terletak pada Diplomasi Militer Klasik yang ada sejak zaman kuno dan dihidupkan kembali pada era Napoleon. Evolusinya, sampai akhir Perang Dingin, yang terfokus pada hubungan militer dan terbatas pada bidang militer klasik. Pada tahun 1990-an, awal era baru dalam urusan internasional, munculnya saling ketergantungan yang kompleks, meningkatnya aktor-aktor baru di kancah global, serta munculnya Diplomasi Publik, semuanya memberi ruang bagi konsepsi baru diplomasi pertahanan. Konsepsi baru ini menyiratkan bahwa Atase Militer telah mengembangkan cakrawala yang lebih luas, untuk mencakup bidang-bidang masalah seperti berikut ini (Juan Emilio Cheyre, 2013):

- Berkoordinasi dengan Pemerintah dan Organisasi Internasional (IO) untuk mendukung operasi penjaga perdamaian (PKO) di mana negara pengirim berpartisipasi.
- Memastikan sifat perubahan yang terjadi dalam Angkatan Bersenjata di negara-negara di seluruh dunia, tidak hanya di negara tetangga, tetapi juga di antara negara-negara besar, di mana perubahan ini sering memicu trend internasional utama di sektor pertahanan dan keamanan. Beberapa dari perubahan ini akan terkait dengan penggunaan kekuatan militer, tetapi yang lain akan berada di bidang administrasi militer, peradilan militer, atau logistik.



- Menetapkan jenis peralatan militer yang tersedia untuk dijual oleh Angkatan Bersenjata lokal, dimana Eropa pada tahun 1990-an, banyak negara harus membuang material dalam jumlah besar, mulai dari senjata hingga pesawat tempur.
- Identifikasi teknologi sistem pertahanan yang lebih luas untuk digunakan di wilayah pertahanan.
- Pertukaran informasi tentang apa yang disebut ancaman *non-tradisional*, di mana kelompok teroris dan kejahatan terorganisir internasional menjadi sangat aktif di era pasca-perang dingin.

Tujuan utama Diplomasi Pertahanan adalah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan keamanan negara, serta tugas untuk menciptakan hubungan dan kerjasama jangka panjang yang stabil yang menumbuhkan transparansi di bidang pertahanan, memperkuat kepercayaan dan mencapai tujuan bersama.

Salah satu instrumen terpenting diplomasi pertahanan adalah menjaga dialog dengan negara mitra sebagai alat komunikasi dan ukuran membangun kepercayaan. Pelaksanaan tugas dalam rangka diplomasi pertahanan meliputi berbagai macam kegiatan baik pegawai sipil (*the civilian*) maupun personil militer Kementerian Pertahanan. Sedangkan bidang utama diplomasi pertahanan antara lain (Lech DRAB, 2018):

- Kerjasama bilateral dan multilateral, yang dibentuk dan dipertahankan pada tingkat yang tinggi oleh perwakilan sipil dan militer;
- Pendidikan dan pelatihan militer;
- Latihan militer;
- Misi dan operasi militer;
- Kerjasama intelijen dan pertukaran informasi tentang situasi militer-politik dan kejadian lain yang berkaitan dengan masalah keamanan dan keadaan Angkatan Bersenjata negara lain;
- Kerjasama dalam organisasi dan aliansi keamanan internasional;
- Aktivitas yang berkaitan dengan kontrol senjata, pelucutan senjata, dan *confidence building measures* (CBM);
- Kerjasama hukum dan legislatif;
- Kerjasama di bidang industri pertahanan;
- Bantuan dan dukungan militer untuk angkatan bersenjata negara lain;
- Kerjasama militer historis dan pendidikan patriotik.

Dalam pedoman yang luas ini, diplomasi pertahanan saat ini memanifestasikan dirinya di bidang-bidang berikut (Juan Emilio Cheyre, 2013):

- Penerapan oleh Organisasi Angkatan Bersenjata, mengupayakan perdamaian melalui tindakan tertentu, menjaga keutuhan wilayah negara dan menciptakan kepercayaan antara angkatan bersenjata negara tetangga;
- Penyebaran Atase Pertahanan, memberikan masukan kepada otoritas politik tentang masalah-masalah keamanan dan pertahanan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan pelaksanaan diplomasi melalui jalur pemerintahan dan konstitusional yang sesuai merupakan fungsi penting lainnya dari diplomasi pertahanan;
- Operasi Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dengan bekerja sama dalam tugas-tugas internasional yang bertujuan untuk menghindari munculnya konflik;
- Pertukaran Pendidikan, pengarahan dan pengelolaan pertukaran militer yang bertujuan memperkuat interaksi operasional dalam pendidikan, logistik, dan personel;
- Konferensi Internasional
- Bisnis dan Logistik

Kontingen Garuda TNI Pada Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) Sebagai Instrumen Pencapaian Kepentingan Nasional yang Lebih Luas

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sehingga TNI melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Secara spesifik, dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/80/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI tentang Penyelenggaraan Operasi Perdamaian Dunia disampaikan bahwa misi pemeliharaan perdamaian TNI bertujuan untuk:

- membantu menciptakan dan memelihara perdamaian di negara tempat misi bertugas;
- membantu PBB dalam penegakkan hukum internasional;
- membantu meningkatkan diplomasi dan mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah RI melalui pencapaian tujuan operasi perdamaian PBB atau organisasi internasional lainnya;
- mendukung citra Indonesia di forum internasional; dan
- memberikan pengalaman bagi prajurit TNI melalui penugasan operasi di luar negeri dalam rangka meningkatkan profesionalisme keprajuritan.

Dalam aspek pertahanan, TNI telah menunjukkan profesionalisme tinggi dalam misi pemeliharaan perdamaian, sehingga terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk berpartisipasi di berbagai wilayah konflik dunia. Profesionalisme ini didukung oleh serangkaian seleksi ketat dan pelatihan intensif yang disiapkan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI).

Kemampuan teknis dan taktis para prajurit, termasuk pengetahuan tentang hukum internasional, Hak Asasi Manusia, serta aturan PBB, merupakan bagian penting dari kesiapan mereka. Di sisi lain, faktor etika, moral, dan integritas juga sangat ditekankan dalam pelaksanaan tugas. Prajurit TNI harus menunjukkan perilaku yang menghormati adat istiadat lokal serta mampu menjaga kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, seperti pasukan dari negara lain, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah setempat.

Kesehatan mental dan fisik menjadi perhatian utama, mengingat situasi konflik yang penuh tekanan. PMPP TNI telah menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung profesionalisme prajurit di lapangan, tetapi perbedaan tingkat pemahaman antar individu tetap menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih dari para perwira pengarah.

Meski demikian, kemampuan interaksi sosial prajurit TNI dengan masyarakat lokal, misalnya melalui partisipasi dalam acara keagamaan, telah menunjukkan hasil positif. Penerimaan masyarakat terhadap prajurit TNI umumnya sangat baik. Ini menjadi modal penting yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam diplomasi pertahanan jika dibekali dengan strategi yang jelas. Namun, setiap misi perdamaian memiliki kompleksitas dan tantangan unik, sehingga strategi diplomasi harus disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Lebih lanjut, Pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian oleh TNI memiliki potensi besar sebagai sarana diplomasi pertahanan yang lebih luas, namun sejauh ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini, diplomasi militer yang dilakukan oleh *peacekeepers* TNI lebih berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan. Padahal, misi perdamaian dapat digunakan untuk memperluas pengaruh nasional di luar bidang militer, seperti promosi produk dalam negeri. Contoh yang nyata terlihat dari Kontingen Korea Selatan yang menggunakan kendaraan produksi domestik selama misi di UNIFIL, Lebanon, sehingga turut mempromosikan produk nasionalnya.

Salah satu faktornya adalah kurangnya pembekalan strategi diplomasi terarah bagi *peacekeepers* TNI. Saat ini, pembekalan hanya terbatas pada pengenalan budaya lokal dan panduan berinteraksi dengan masyarakat setempat, tanpa arahan khusus untuk mencapai target diplomasi tertentu yang mendukung kebijakan negara.

Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan antara sektor pertahanan, diplomasi, dan pembangunan industri pertahanan yang dapat menghambat integrasi. Perbedaan prioritas ini berpotensi menciptakan hambatan dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan yang efektif, terutama di area *soft power* dan *hard power*.

Tugas pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh prajurit dalam misi ini sejatinya bisa diintegrasikan dengan diplomasi pertahanan, namun hingga saat ini belum ada arahan atau

panduan strategis yang jelas mengenai bagaimana aspek pertahanan tersebut dapat digunakan untuk mendukung diplomasi pertahanan.

Terdapat sejumlah kendala atau tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam koordinasi dan sinergitas antar institusi terkait, antara lain:

1. Koordinasi Antara TNI dan Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait. Masih terdapat perbedaan persepsi dan pendekatan antara TNI, khususnya TNI AD, dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), serta instansi lain dalam menyusun strategi diplomasi pertahanan yang terintegrasi dengan misi pemeliharaan perdamaian. Diplomasi militer belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional di sektor ekonomi, seperti promosi produk pertahanan Indonesia di pasar internasional. Fragmentasi kebijakan antar institusi menghambat penyusunan pedoman terpadu terkait tujuan strategis dalam misi tersebut.
2. Kurangnya Arahan Strategis Diplomasi Pertahanan. Saat ini, diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh *peacekeepers* TNI lebih berfokus pada tugas keamanan dan stabilitas lokal tanpa target capaian diplomatik yang jelas, seperti promosi produk industri strategis. Pembekalan yang diterima prajurit TNI sebelum berangkat masih minim dalam aspek *soft power*, khususnya strategi diplomasi ekonomi dan promosi industri nasional.
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Logistik. Penyediaan produk dalam negeri seperti APC Anoa dan Komodo di misi perdamaian masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun logistik pendukung. Selain itu, kendala logistik di daerah operasi sering kali menjadi tantangan dalam memastikan ketersediaan suku cadang dan perawatan produk Indonesia di lapangan.
4. Sinergi dengan Industri Nasional. Industri pertahanan nasional, meski telah berkembang, masih membutuhkan dorongan lebih besar untuk berpartisipasi dalam skala internasional melalui misi PBB. Belum semua produk strategis memiliki sertifikasi internasional yang diakui oleh PBB, sehingga mengurangi peluang produk tersebut digunakan secara lebih luas dalam misi.
5. Penguatan Kapasitas SDM Terkait Diplomasi Ekonomi. Untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas diplomasi pertahanan, diperlukan pelatihan tambahan bagi prajurit dan perwira terkait diplomasi ekonomi, promosi produk nasional, serta pengetahuan tentang potensi pasar internasional.

Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui strategi terpadu dan sinergi antar-lembaga, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dapat menjadi instrument dalam pencapaian kepentingan nasional yang lebih luas dengan menjadi jembatan diplomasi ekonomi, sekaligus mendorong industri strategis nasional bersaing di pasar global.

Upaya konkret untuk mengatasi kendala dalam pengembangan industri strategis nasional melalui partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, khususnya dalam hal diplomasi pertahanan, koordinasi antar lembaga, dan promosi produk dalam negeri, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Strategi Koordinasi dan Sinergitas Antar Lembaga. Untuk menciptakan sinergi yang efektif antara TNI, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), PT Pindad, dan pelaku industri lainnya, perlu disusun kerangka kerja strategis terpadu. Upaya ini melibatkan:
 - Pembentukan Tim Koordinasi Antar-Lembaga Khusus Misi Perdamaian yang bertugas memastikan kebijakan, perencanaan, dan implementasi misi pemeliharaan perdamaian sejalan dengan tujuan promosi produk pertahanan nasional.
 - Pembuatan Protokol Bersama (*Joint Protocol*) yang mengintegrasikan diplomasi pertahanan dengan strategi diplomasi ekonomi dan promosi industri strategis nasional.

Setiap misi TNI di bawah PBB harus mencakup agenda promosi produk nasional dengan

melibatkan Kemlu dan Atase Pertahanan di negara penugasan untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan lokal.

2. Diplomasi Pertahanan Terarah dan Berbasis Target. Diplomasi pertahanan dalam misi perdamaian harus dirancang dengan target capaian yang jelas, misalnya:
 - Promosi Produk Pertahanan Nasional: Menggunakan kendaraan Anoa, Komodo, dan senjata SS sebagai *showcase* produk Indonesia di daerah misi. Untuk itu diperlukan Pelatihan Khusus Diplomasi Ekonomi bagi prajurit yang akan ditugaskan ke misi PBB, bekerja sama dengan Kemlu dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 - Meningkatkan Citra Industri Pertahanan Indonesia di mata dunia dengan memastikan produk yang digunakan sesuai dengan standar internasional dan memiliki performa yang baik. Upaya ini dapat dilakukan dengan Penyusunan Modul Pembekalan Diplomasi Pertahanan untuk *peacekeepers* TNI, berisi materi terkait peran sebagai duta industri nasional, strategi komunikasi dengan masyarakat lokal, dan keterampilan negosiasi.
3. Penguatan Infrastruktur dan Logistik. Infrastruktur logistik untuk mendukung pengiriman, perawatan, dan ketersediaan suku cadang produk dalam negeri di daerah misi sangat penting. Tantangan ini dapat diatasi dengan:
 - Kerja Sama Logistik Internasional melalui Kemhan dan mitra PBB untuk menyediakan fasilitas perawatan kendaraan dan senjata di dekat wilayah operasi.
 - Peningkatan Kapasitas Bengkel Perawatan Lapangan yang dikelola oleh personel TNI yang telah dilatih khusus oleh PT Pindad.
 - Pengiriman Suku Cadang Strategis secara Berkala sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Sertifikasi Internasional Produk Pertahanan. Salah satu tantangan besar adalah standarisasi dan sertifikasi internasional untuk produk-produk pertahanan Indonesia agar diakui oleh PBB dan negara-negara lain. Upaya yang dapat dilakukan:
 - Bekerja sama dengan Badan Standar Internasional seperti NATO *Support and Procurement Agency* (NSPA) untuk mendapatkan sertifikasi.
 - Meningkatkan Uji Kelayakan Produk sesuai dengan standar misi PBB melalui uji lapangan (*field test*) di luar negeri.
 - Promosi melalui Forum Internasional, seperti *Defense Expo* dan *UN Peacekeeping Exhibition*.
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelatihan Khusus. Untuk memastikan efektivitas diplomasi pertahanan, perlu peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi prajurit TNI maupun pihak industri. Langkah-langkah yang dapat dilakukan:
 - Pelatihan Soft Power Diplomacy bagi prajurit TNI, mencakup keterampilan komunikasi, negosiasi, dan interaksi budaya lokal.
 - Kolaborasi dengan Akademi Pertahanan Internasional untuk memberikan pendidikan tentang diplomasi ekonomi dan promosi industri strategis.
 - Penempatan Atase Pertahanan dengan Fokus Ekonomi di negara tempat misi untuk memfasilitasi koordinasi antara TNI dan pelaku industri nasional.
6. Peningkatan Peran Industri Pertahanan Nasional. Sinergi antara pemerintah dan industri nasional perlu diperkuat untuk memastikan industri strategis dapat mendukung misi perdamaian secara berkelanjutan.
 - Insentif Pemerintah bagi perusahaan yang produknya digunakan dalam misi PBB, seperti keringanan pajak atau subsidi.
 - Penguatan Riset dan Pengembangan (R&D) untuk menghasilkan produk dengan teknologi tinggi yang sesuai kebutuhan di lapangan.
 - Fasilitasi Kerja Sama dengan Mitra Internasional untuk mempercepat transfer teknologi.

Jika upaya ini dilaksanakan secara terencana, Indonesia dapat memanfaatkan partisipasinya dalam misi pemeliharaan perdamaian untuk meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional, membuka peluang ekspor produk strategis, serta memperkuat posisi diplomatik di dunia internasional.



SIMPULAN

Diplomasi militer secara tradisional difokuskan pada keterlibatan militer dalam pengaturan keamanan dan misi internasional. Diplomasi ini mencakup peran atase militer dan perwakilan militer dalam negosiasi terkait perlucutan senjata dan pengendalian senjata. Tujuannya antara lain membangun kerja sama militer internasional, meningkatkan kemampuan pertahanan, serta mendorong interoperabilitas militer. Dalam konteks modern, istilah “militer” digunakan untuk menyebut kegiatan yang dilakukan unit berseragam dalam pembentukan pertahanan negara. Diplomasi militer memiliki cakupan lebih terbatas dibandingkan diplomasi pertahanan, yang mencakup hanya tugas-tugas khusus perwakilan militer dan atase pertahanan.

Beberapa tujuan diplomasi militer, seperti yang diuraikan oleh KA Muthanna, meliputi dialog politik, kerja sama pertahanan, partisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB, bantuan kemanusiaan, serta pengembangan industri pertahanan nasional melalui pengadaan dan Litbang (R&D) pertahanan.

Diplomasi pertahanan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan diplomasi militer. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Inggris dalam Strategic Defence Review pada tahun 1998. Diplomasi pertahanan melibatkan hubungan antarnegara dalam aspek keamanan dan pertahanan, bertujuan untuk mencegah konflik, membangun kepercayaan, serta membantu pengembangan angkatan bersenjata yang demokratis dan bertanggung jawab. Aktivitas dalam diplomasi pertahanan meliputi kerja sama bilateral dan multilateral, penunjukan atase pertahanan, pelatihan personel militer asing, pertukaran informasi pertahanan, serta pengadaan peralatan militer. Diplomasi pertahanan menekankan dialog dan kerja sama internasional untuk memperkuat hubungan pertahanan serta mendukung kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam pandangan kontemporer, diplomasi pertahanan digunakan untuk membangun kepercayaan, mencegah krisis, serta menyelesaikan konflik melalui dialog dan kerja sama. Kementerian Pertahanan berbagai negara memainkan peran sentral dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan, dengan memobilisasi keahlian militer dan personel pertahanan guna mencapai tujuan nasional di ranah internasional. Akan tetapi, dengan pendekatan komprehensif, diplomasi pertahanan Indonesia berpotensi bertransformasi menjadi instrumen soft power yang efektif dalam memperkuat daya saing global dan kapasitas ekspor produk pertahanan domestik. Keterlibatan TNI dalam misi penjaga perdamaian menunjukkan peran strategis mereka dalam mewujudkan stabilitas global. Dengan kerangka hukum yang jelas serta sinergi antara sektor militer, diplomatik, dan pembangunan, TNI dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi internasional yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Art, Robert Jeffrey and Patrick M. Cronin (2003). *The United States and Coercive Diplomacy*. Washington DC: US Institute of Peace Press
- Berridge, G., & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bangun, E. (2014, September-Oktober). Peran TNI Untuk Mencapai Kemandirian Pertahanan (Kontemplasi di Hari Ulang Tahun ke-69 TNI). *Media Informasi Kementerian Pertahanan WIRA*, 50, 37.
- B. S. Sachar. (2004). “Military Diplomacy through Arms Transfers: A Case Study of China,” *Strategic Analysis* Vol. 28, No. 2 (2004), p. 290.
- Blannin, Patrick. (2018). *Defence diplomacy in the long war beyond the aiguillette*. Bond University
- Cottey, Andrew and Anthony Forster. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, ed. International Institute for Strategic Studies, vol. Volume 9, Nomor 1, Februari 2025



365, Adelphi Paper. New York, United States of America: Oxford University Press.

DRAB, Lech . (2018). Defence Diplomacy – An Important Tool For The Implementation Of Foreign Policy And Security Of The State. War Studies University, Poland

Evans, G., & Newnham, J. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Pinguin Books.

Fetic, Sorin Gabriel. (2014). Fields Of Classic Diplomacy With Which Defence Diplomacy Interacts Horizontally. Preventive Diplomacy, Coercive Diplomacy. Revista Academiei Forțelor Terestre Nr. 1 (73)/

Jackson, R., & Sorensen, G. (2010). Introduction to International Relations, Theories and Approaches. United Kingdom: Oxford University Press.

Juan Emilio Cheyre. (2013). The Oxford Handbook of Modern Diplomacy: Defence Diplomacy

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengataan ALat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Buku Penyelarasan Minimum Essential Force Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI. (2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Lech DRAB. (2018). Defence Diplomacy – An Important Tool For The Implementation Of Foreign Policy And Security Of The State. War Studies University, Poland

Laksmana, Evan A. . (2012). Regional Order by Other Means? Examining the Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia. Asian Security, vol. 8, no. 3, 2012, pp. 251–270

Muthanna, KA. (2011). Military Diplomacy. 2011. Journal of Defence Studies Vol 5. No 1. January 2011

Plessis, Du. (2018) dalam Blannin, Patrick. Defence diplomacy in the long war beyond the aiguillette. Bond University

Sachar. B. S. . (2004). Military Diplomacy through Arms Transfers: A Case Study of China,” Strategic Analysis Vol. 28, No. 2. p. 290

Syawfi, Idil. (2009). Aktifitas Diploması Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003–08)”. Jakarta: Tesis Magister, University of Indonesia

Yusgiantoro, P. (2014). Ekonomi Pertahanan : Teori & Praktek. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.